

**BAB 4**  
**ANALISA MEDIASI YANG EFEKTIF OLEH CRISIS MANAGEMENT**  
**INITIATIVE (CMI) DALAM KONFLIK INTERNAL DI ACEH**

Konflik yang terjadi di Aceh dapat dianggap sebagai konflik politik, merupakan konflik vertikal yang terjadi karena pertentangan antara kelompok separatis Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terhadap pemerintah Republik Indonesia (RI) akibat kebijakan pemerintah RI yang dianggap tidak memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat Aceh. Dengan eksplorasi sumber daya alam yang besar-besaran dari Aceh menyebabkan ketidakadilan sosial ekonomi.

Hadirnya separatisme di Aceh, direspon oleh pemerintah Indonesia dengan mengirimkan tentara untuk menyelesaikan konflik di lapangan. Pada akhirnya, terjadi tindak kekerasan militer oleh aparat tentara dalam menjalankan tugas menertibkan pemberontakan oleh GAM, banyak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Seiring berjalannya waktu, telah melewati beberapa kali pergantian kepemimpinan di Indonesia, pada akhirnya pemerintah RI pun berinisiatif melakukan usaha untuk melakukan usaha untuk mewujudkan perdamaian. Perundingan yang ditempuh oleh RI dan GAM tergolong sebagai upaya untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh.

Dahrendrof yang mengutip Kerr menekankan bahwa hadirnya pihak ketiga amat penting dalam pengaturan pertentangan. Ada beberapa jenis peran pihak ketiga ini yaitu konsiliasi, mediasi, arbitrase (penindasan). Bentuk yang cocok dalam konteks penyelesaian separatisme di Aceh adalah mediasi.

Di Aceh, upaya menghadirkan pihak ketiga dalam bentuk dialog, yang belum pernah ada sebelumnya, antara pemerintah dan GAM, yang diprakarsai oleh Gus Dur dan diteruskan oleh Megawati, menghadirkan NGO Hendry Dunant Centre (HDC) sebagai pihak ketiga tetapi dialog ini gagal.

Kedua belah pihak bertanggung jawab atas gagalnya perjanjian untuk mengakhiri permusuhan, dan kelemahan-kelemahan dalam proses dialog sendiri juga merupakan sebuah faktor. Tetapi satu dari masalah-masalah terbesar

menjelang akhir tahun 2001 adalah bahwa seluruh dialog dibangun di seputar kesediaan menerima otonomi khusus sebagai titik tolak diskusi, dan undang-undang yang disahkan oleh DPR tentang Aceh banyak kelemahannya. Undang-undang itu tidak berbicara mengenai persoalan-persoalan keadilan yang menjadi pusat perhatian bagi banyak orang Aceh. Dan undang-undang itu memberikan kekuasaan yang terlalu besar kepada pemerintah yang diduga mengambil keuntungan besar dari sumber daya alam Aceh.

Selain itu terdapat fakta bahwa administrasi dan pelaksanaan paket otonomi itu diberikan kepada pemerintah provinsi yang jelas-jelas tidak mampu memperbaiki jalan-jalan yang rusak dan infrastruktur lainnya, tidak ampu memberikan layanan umum, atau tidak mampu menjaga keamanan. Tidak mengherankan jika sejumlah orang Aceh mempertanyakan manfaat otonomi, karena mereka samasekali tidak melihat manfaat. Dan juga tidak mengherankan jika banyak tempat, GAM bergerak untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh pejabat-pejabat setempat yang tidak bertanggung jawab. Pejabat setempat tidak hanya meninggalkan pos-pos mereka karena takut ancaman dari GAM. Di beberapa tempat, mereka murni lalai dan mengabaikan saja tugas masing-masing, sedemikian rupa sehingga mereka dikenal dengan sebutan kelompok 23-7, pejabat yang menghabiskan 7 hari dalam sebulan menjalankan tugas masing-masing dan menghabiskan 23 hari selebihnya di Medan atau Jakarta. GAM secara aktif memanfaatkan kekosongan pemerintahan ini untuk meperkuat posisinya.

Jadi bisa dilihat bahwa Jakarta meletakkan paket otonomi yang penuh kelemahan dalam tangan sebuah pemerintah yang tidak mampu menggunakan tipu muslihat dalam perundingan mengenai penghentian permusuhan ketika bagian yang lain sudah menentukan akhir dari permainan politik itu dengan sebuah undang-undang otonomi khusus. Seperti dikatakan oleh sejumlah pakar, jika kita memang benar-benar ingin berunding, janganlah sekali-kali menentukan terlebih dahulu hasil dari perundingan, karena jika demikian, apalagi yang bisa dirundingkan?

Gagalnya Perjanjian Penghentian Permusuhan, diikuti kemudian dengan pernyataan keadaan darurat militer atau apa yang dinamakan Operasi Terpadu. Masalahnya adalah aspek militer dari operasi-operasi bersangkutan tampaknya

mendominasi aspek-aspek yang selebihnya. Selain itu, otonomi, dalam arti orang Aceh mengatur Aceh sendiri, sudah mati sama sekali – Aceh diataur dari Jakarta, dan lebih banyak oleh TNI daripada tangan-tangan pemerintahan yang lain. Langkah-langkah kebijakan apa yang perlu diambil harusnya untuk mewujudkan pemerintahan yang responsif, bertanggungjawab, dan efektif, pemerintahan yang benar-benar mampu menyingkirkan dukungan, terbuka ataupun terselubung, bagi kemerdekaan. Saat itu yang muncul pertanyaan adalah, bagaimana caranya melaksanakan paket otonomi yang bermakna, bila paket yang pertama sudah demikian tidak dipercaya? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat dijawab dengan memuaskan, operasi-operasi militer yang saat itu tengah berjalan hanya berhasil mengguhkan, namun tidak dapat mencegah, munculnya generasi baru pemberontak.

Kemudian selanjutnya pada masa pemerintahan Presiden SBY dilakukan kembali mediasi untuk mengatasi konflik di Aceh. Dalam mediasi konflik Aceh ini, baik GAM maupun pemerintah RI yang sedang bersengketa bersama-sama sepakat untuk menunjuk CMI sebagai mediator untuk pengaturan pertentangan.

Bab ini akan menganalisis mediasi yang dilakukan oleh CMI mulai dari teknik-teknik yang dipakai, menganalisa faktor keberhasilan CMI, dan pada akhirnya akan menjawab keefektifan atau tidaknya mediasi yang dilakukan CMI berdasarkan indikator-indikator yang ditemukan.

#### **4.1 Dinamika Proses Negoosiasi**

Lima putaran perundingan Helsinki mengizinkan diskusi yang lebih rinci tentang beberapa isu-isu kunci tentang masa depan Aceh. Di antara putaran negoosiasi, kedua belah pihak dapat melakukan berkonsultasi. Proses negoosiasi mengalami dinamika yang naik turun, kadang-kadang ada masa dimana perundingan mengalami jalan buntu.

##### **4.1.1 Putaran pertama**

Putaran pertama merupakan penjajakan posisi dasar bagi kedua belah pihak yang bertikai. Marti Ahtisaari langsung mengemukakan bahwa tempat

pertemuan sengaja diadakan di gedung milik pemerintah Finlandia yang tempatnya terpencil yang cukup jauh dan terisolasi agar pada saat perundingan berlangsung, tidak mendapat gangguan dari pihak luar. Pertemuan dibikin tertutup, dan para pihak yang bertikai diajukan syarat agar kedua belah pihak tidak banyak berbicara kepada pers.

Agenda untuk putaran pertama awalnya tidak jelas, sidang pertama didominasi oleh desakan pemerintah Indonesia bahwa Aceh menuntut untuk mendapatkan kemerdekaan dan tidak menerima otonomi dalam negara Indonesia. Sejak pada awalnya tidak ada kesepakatan dapat dicapai mengenai masalah penting ini, pembicaraan yang dihadapi mengalami. Marti Ahtisaari langsung menentukan agenda pertemuan untuk solusi mengenai otonomi khusus.

Marti Ahtisaari mengarahkan untuk pembicaraan ke agenda otonomi khusus. Beliau menawarkan daftar agenda yang harus didiskusikan: otonomi khusus, bagaimana melakukan reintegrasi, agenda amnesty, perilaku militer serta jaminan tentang adanya sistem dan mekanisme monitoring. MA mengarahkan pembicaraan untuk mengangkat inti soal, yakni: apa bentuk otonomi khusus itu, bagaimana dengan amnesty serta hukum militer. Mengajukan agenda untuk membicarakan soal partisipasi politik rakyat Aceh dalam pemilihan umum, partisipasi rakyat dalam setiap agenda internal, penghentian konflik, hak asasi manusia, demokrasi, dan keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh.

Dalam kesempatan ini MA menyatakan kepada GAM, agar mereka melupakan ide dan pembicaraan tentang ide kemerdekaan. Dan memberikan peringatan kepada GAM, bahwa tidak ada alasan untuk pembicaraan tentang kemerdekaan. Dan MA hanya mau berbicara dalam kerangka otonomi khusus. Dalam hal ini MA sebagai mediator sudah menutup kemungkinan pembicaraan tentang kemerdekaan. MA menyatakan bahwa GAM dengan keinginan untuk merdeka tidak akan bisa mendapatkan dukungan internasional, karena MA bisa menggunakan pengaruhnya agar GAM tidak mendapat dukungan international.

Pada putaran pertama ini, mediator memberikan kesempatan pada kedua pihak yang bertikai untuk melakukan pembicaraan tanpa mediator untuk memulai diskusi dan tawar menawar. Dengan pembatasan bahwa keduabelah pihak tidak perlu mengungkap lagi persoalan yang telah lewat. Tetapi lebih membicarakan

cara penyelesaian konflik dengan sesuatu yang realistis dan bisa diimplementasikan.

Pada hari kedua, putaran pertama, MA membuka pertemuan dengan memberikan batasan bahwa tujuan dialog adalah untuk penyelesaian secara menyeluruh. Mediator memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan dialog tanpa mediator.

Pada akhir putaran ini, para delegasi telah mencapai beberapa kesamaan. Ahtisaari meletakkan dasar dari awal bahwa perundingan yang dilakukan adalah penyelesaian konflik secara menyeluruh dan dalam konteks Aceh tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ahtisaari mengakhiri putaran pertama dengan memberikan agenda untuk putaran kedua seperti yang telah disepakati sebelumnya, yaitu :

- Pertama, pembicaraan tentang otonomi khusus Aceh.
- Kedua, pemberian amnesti dengan segala prosesnya.
- Ketiga, pengaturan keamanan
- Keempat, sistem monitoring pengaturan keamanan. Mediator menawarkan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk menggunakan jasa baik Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang bekerja sama, bahu membahu.
- Kelima, pembicaraan tentang tahapan-tahapan pencapaian dan waktu yang jelas. (berdasarkan *minutes of meeting*, putaran 1, hari ketiga)<sup>34</sup>

#### **4.1.2 Perundingan putaran kedua**

Dalam putaran kedua, perundingan damai Aceh ini, sudah mulai menyentuh substansi. Ahtisaari sebagai mediator membuka pertemuan perundingan dengan menekankan batasan perundingan pada putaran kedua didasarkan pada pembicaraan tentang otonomi khusus sebagai agenda utama pada hari pertama dan pada hari selanjutnya mengenai hal-hal detail. Kendati perbedaan sikap dan posisi antara pemerintah dan GAM masih saja menonjol. Dalam putaran kedua inilah, untuk kali awal GAM sudah menunjukkan sikap mendengarkan tawaran pemerintah.

---

<sup>34</sup> Awaludin, Hamid. (2008), *Damai di Aceh, Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, CSIS

Di putaran kedua ini bisa dilihat perubahan tuntutan GAM dari kemerdekaan sendiri menjadi pemerintahan-sendiri. Selama dua putaran berikutnya GAM, pemerintah Indonesia dan mediator akhirnya menetap pada konsep 'pemerintahan sendiri', yang bagi banyak pengamat imparisial mirip dengan pemberian otonomi. Tapi GAM pada mulanya tidak menerima karena masih menuntut untuk merdeka. Mereka masih teringat masa lalu yang menganggap pemerintah memberikan janji-janji kosong.

Rincian mengenai pemerintahan sendiri juga kritis, dan menjadi poin besar yang sulit diselesaikan pada akhir pembicaraan. Pertanyaan yang paling sulit adalah apakah partai politik Aceh akan diizinkan, sebuah poin yang dituntut keras oleh GAM. Namun pemerintah Indonesia menganggap partai politik tingkat provinsi merupakan ancaman besar, seperti yang terjadi dalam sejarah selama ini, mereka tidak pernah diizinkan terlibat dalam politik. Keberadaan mereka dianggap untuk mendorong simpati separatis, serta mengancam persatuan nasional. Namun bagi GAM, status partai Aceh menjadi prioritas utama. Seperti yang telah dikatakan salah satu penasihat GAM 'Keberhasilan atau kegagalan pembicaraan tergantung pada satu isu tersebut'. Bagi GAM, pengakuan partai politik lokal berarti bahwa memungkinkan wakil GAM untuk terpilih, dan memungkinkan mengendalikan baik legislatif Aceh dan cabang eksekutif. Hal ini akan memberikan baik legitimasi demokrasi dan hukum untuk aspirasi mereka serta hubungan mereka dengan pemerintah pusat. Para pihak yang bernegosiasi menyimpan isu politik yang sangat sensitif ini sampai dengan pembicaraan tahap terakhir, yang memungkinkan untuk membangun kepercayaan antara pihak-pihak saat mereka mengatasi permasalahan-permasalahan terkait yang lebih mudah. Agenda yang juga dibahas adalah amnesti. Mediator juga menyinggung soal pendidikan dan pengaturan keamanan.

Pada hari kedua, putaran kedua, agenda yang dibicarakan adalah mengenai pemakaian terminologi *self-government* didalam Indonesia (pengaturan sendiri dalam wilayah Negara Indonesia). Ahtisaari sebagai mediator mengingatkan kedua belah pihak agar tidak melakukan perundingan dengan menyinggung masa lalu. Pada saat perundingan pihak GAM berulang kali menyinggung mengenai masa lalu yang terjadi di Aceh dan juga menyinggung kasus Timor Timur dan

beberapa kali menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia di masa lalu banyak memberikan janji-janji palsu dan juga melakukan pelanggaran HAM. Di sini MA mengingatkan bahwa dalam perundingan ini, hal-hal dimasa lalu tidak perlu disinggung lagi. MA memberikan pandangan, masa masa pemerintahan Indonesia yang pada masa perundingan di pimpin oleh SBY mempunyai komitmen kuat untuk penyelesaian masalah Aceh.

Ahtisaari juga memberikan batasan, bahwa format jumlah orang-orang yang terlibat dalam perundingan tidak boleh bertambah dan berubah untuk menghindarkan, pembicaraan yang sudah mengalami kemajuan tidak menjadi mundur karena adanya pihak baru yang terlibat. Di hari yang sama, Ahtisaari sebagai mediator mengangkat topik pembicaraan mengenai Memorandum of Understanding dan juga sistem monitoring.

Hari ketiga, putaran kedua, Ahtisaari mengajukan agenda yang akan dibahas dalam putaran berikutnya seperti: otonomi khusus ataukah *self-government*, pemilihan provinsi dan pemilihan lokal, partai politik lokal, pengaturan ekonomi (sistem audit buat pendapatan provinsi, persentase pajak untuk pusat dan daerah, fasilitas untuk integrasi GAM), amnesti (definisi dan jangkauannya, masalah-masalah legal), pengaturan keamanan (pengurangan personil TNI) dan polisi setelah penyelesaian terjadi, penyerahan senjata GAM), monitoring dari pihak luar (elemen militer dan sipil serta peranan ASEAN dan Uni Eropa), dan dialog dalam masyarakat Aceh sendiri untuk menghindari adanya kesalahpahaman.

Ahtisaari sebagai mediator menyatakan tetap tidak akan membuka agenda perundingan kepada pers, untuk menjaga tidak ada kesimpangsiuran berita oleh media dan tanggapan dari pihak luar yang tidak diinginkan selama masa perundingan. Yang bisa menjadi kendala dalam proses perundingan.

Dalam putaran kedua ini, Ahtisaari memberikan kesempatan untuk kedua belah pihak melakukan pertemuan-pertemuan sendiri tanpa perantara. Dan juga menggunakan kesempatan untuk mempunyai pertemuan tersendiri baik dengan pihak Indonesia saja, atau dengan pihak GAM saja.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid

#### 4.1.3 Perundingan putaran ketiga

Putaran ketiga yang dilakukan pada bulan April 2005. Semua dialog dari awal tetap diadakan tertutup. Menghindari percakapan terbuka ke publik, sebab bisa menjadi batu sandungan untuk kelanjutan perundingan.

Putaran ketiga ini terjadi selama lima hari. Pada putaran ketiga ini, lebih banyak pertemuan langsung delegasi Pemerintah dan GAM tanpa diperantarai Ahtisaari. Selain itu, lobi antara para ketua delegasi dan Ahtisaari juga lebih banyak digelar. Jika GAM di awal perundingan masih berketat dan menuntut pembicaraan pada agenda self-government, namun hari-hari berikutnya mereka justru sangat produktif dan konstruktif. Pembicaraan telah menyentuh dan membicarakan substansi persoalan. Sebagai contoh, GAM sudah menanggapi dan mengajukan usul konkret tentang apa yang mereka kehendaki.

Mediator mengawali pertemuan dengan para delegasi pemerintah Indonesia. Dengan niat GAM yang ingin mencari ahli dari luar untuk membantu mereka. Pada kesempatan ini Ahtisaari mengatakan pada delegasi pemerintah Indonesia bahwa pihak mediator akan memfasilitasi dengan menyediakan ahli hukum tata negara Swiss untuk GAM. Dan sebelum bertemu dengan GAM, mediator akan meminta ahli hukum tersebut bertemu dahulu dengan delegasi pemerintah Indonesia sebelum bertemu dengan GAM.

Ahtisaari juga menekankan pembatasan topik pembicaraan dalam perundingan. Pertama, *self-government* di dalam kerangka otonomi khusus dalam Republik Indonesia. Kedua, partisipasi politik, yang berarti adanya pemilihan lokal yang dimonitor. Ketiga, adanya dialog dalam masyarakat Aceh sendiri.

Ahtisaari juga meminta izin kepada pemerintah Indonesia untuk memperkenan pihak GAM membawa tim ahlinya ke dalam ruangan pertemuan. Dalam hal ini, mediator menghormati kedua belah pihak dan tidak mengambil keputusan sendiri membiarkan pihak lain untuk berada dalam lokasi perundingan tanpa persetujuan keduabelah pihak. Ahtisaari mengambil kesempatan untuk pembicaraan tersendiri dengan pihak GAM selama dua jam lebih.

Saat delegasi pemerintah dengan GAM kembali bertemu, Ahtisari mengusulkan untuk delegasi kedua belah pihak yang bertikai melakukan makan siang dan makan malam bersama secara bilateral. Mediator memberikan



kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memanfaatkan forum tersebut untuk saling menukar informasi dan membagi rasa dalam pertemuan yang informal semata-mata untuk mencari solusi damai dengan suasana yang lebih informal.

Dalam pertemuan siang hari pertama, agenda yang diangkat oleh mediator adalah mengenai isi dari konsep *self-government*. Mediator yang melihat bahwa pihak GAM memberikan arahan bahwa yang dibutuhkan adalah mengevaluasi hukum yang mengatur Aceh pada saat perundingan terjadi. Disini Ahtisaari kembali menekankan bahwa keduabelah pihak tidak bisa melanjutkan diskusi termasuk sistem monitoring kalau kedua belah pihak belum sepakat dan menandatangani akta perdamaian.

Pada hari kedua, putaran pertama, Ahtisaari membuka pertemuan dengan agenda ekonomi (*facilitation of integration*). Juga mengangkat isu mengenai menjaga keamanan agar rakyat Aceh bebas dari tekanan. Mengevaluasi bagaimana perilaku polisi dan TNI. Juga untuk dibahas bagaimana fungsi anggota polisi dan TNI yang organik dalam menjaga keamanan. Ahtisaari mengajukan agenda selanjutnya untuk membahas masalah dekomisi.<sup>36</sup>

Selama putaran ini masih terus membahas mengenai transformasi politik GAM. Terlepas dari perdebatan yang alot antara delegasi RI dan GAM, perundingan putaran ketiga telah berhasil menyepakati sejumlah isu krusial yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak juru runding. Martti menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah membahas dan menyepakati sejumlah isu krusial sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak memandang bahwa penyelesaian secara permanen dan komprehensif konflik Aceh (*Both parties seek a permanent and comprehensive solution with dignity for all*)
2. Menegosiasikan definisi kerangka dari struktur administratif Aceh (*The negotiations will seek to define the framework for the local administrative structure of Aceh*)
3. Eksplorasi atas partisipasi local dalam pemilu (*The negotiations will explore the form of participation in local elections*)

---

<sup>36</sup> Ibid

4. Mendefinisikan secara rinci mengenai amnesty (*The negotiations will define the details of providing amnesty*)
5. Transparansi dalam hal pendapatan dan alokasi dana antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh (*Transparency will be enhanced for the collection and allocation of revenues between the central government and Aceh*)
6. Kedua belah pihak membuka peluang bagi regional organisasi untuk memonitor komitmen yang akan disepakati oleh kedua belah pihak (*Both parties welcome the possible involvement of regional organizations in monitoring the commitments that will be undertaken by the parties in the agreement*)
7. Kedua belah pihak tidak melakukan pergerakan pasukan selama proses perundingan berlangsung (*Both parties will do their utmost to restrain their security forces in the field during the negotiations process*)

Dalam putaran ini mediator lebih banyak memberikan kesempatan pada kedua belah pihak untuk melakukan negosiasi tanpa mediator terlibat di dalamnya.

#### **4.1.4 Perundingan putaran keempat**

Putaran keempat merupakan titik kritis kedua. Pertemuan awal, hari pertama, dengan delegasi RI yaitu membicarakan masalah partisipasi politik GAM. Pertemuan hanya antara pimpinan delegasi kedua belah pihak, Ahtisaari meminta keduabelah pihak yang bertikai untuk memfokuskan pembicaraan pada konsep dan rencana pemberian amnesti.

Siang hari, dilanjutkan dengan pertemuan para pimpinan kedua belah pihak, Pertemuan antara Martti Ahtisaari dengan para pimpinan kedua belah pihak, untuk membuka dengan agenda partai politik lokal agar GAM bisa melakukan kegiatan politik dengan hak-hak yang sama dengan warga negara lainnya.

Kemudian dilanjutkan perundingan keduabelah pihak, agendanya adalah mengenai amnesti. Ahtisaari meminta agar pimpinan delegasi Indonesia, Hamid Awaludin, untuk menjabarkan mengenai klasifikasi amnesti. Dilanjutkan dengan

agenda pengaturan ekonomi, pajak, spesifikasi tentang fasilitas integrasi bagi korban konflik Aceh.

Hari kedua, pertemuan para pimpinan delegasi dengan penasehat GAM, Damien Kingsbury, seorang professor asal Australia. Ahtisaari ingin mendengar pendapat Damien, mengenai masalah otonomi untuk Aceh, tetapi dari hasil pembicaraan, Damien tidak bisa memberikan masukan banyak, dan terlihat tidak memahami konteks konflik sesungguhnya, dan tidak mengikuti perkembangan pemerintahan di Indonesia.

Dalam putaran keempat ini juga ada pembahasan mengenai pembentukan misi pengawasan oleh Uni Eropa. Hari kelima, putaran keempat, Ahtisaari memfasilitasi kedua belah pihak yang bertikai untuk bertemu dengan kepala misi pengasawan yang telah ditunjuk oleh Uni Eropa, Pieter Feith. Dalam perjanjian tersebut memberi direktur operasi pemantauan, Pieter Feith, wewenang yang sangat luas untuk bekerja di provinsi ini. Beliau bahkan memiliki keputusan akhir dalam pertanyaan-pertanyaan kontroversial, seperti siapa yang akan diampuni dan siapa yang tidak. Menyerahkan kekuasaan yang luas tersebut kepada orang asing tidak akan mudah di negara manapun. Juga mengenai fakta yang didapat bahwa Feith adalah warga negara Belanda, negara kolonial yang sebelumnya pernah berkuasa di Indonesia, telah membuat masalah lebih menjadi tidak mudah bagi pemerintah Indonesia untuk menerima kenyataan tersebut pada masa perundingan.<sup>37</sup>

#### **4.1.5 Perundingan putaran kelima : mengalami kebuntuan dan terancam bubar**

Putaran kelima sempat mengalami jalan buntu dan perundingan hampir terancam bubar tetapi akhirnya bisa diatasi oleh Martti Ahtisaari. Ahtisaari pertama, putaran kelima, diawali dengan pertemuan antara Ahtisaari dengan delegasi Indonesia, MA meminta agar perundingan bisa dimulai dengan draft MOU.

Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan dengan kedua delegasi, MA memberikan kesempatan kedua belah pihak untuk mengungkapkan beberapa

---

<sup>37</sup> Ibid

pernyataan sikap dari para ketua delegasi. Kemudian dilanjutkan dengan membahas draft MOU, mulai dengan istilah Pemerintahan Aceh dan juga partisipasi GAM dalam politik.

Siang hari pada hari pertama, kembali dilanjutkan pertemuan kedua belah pihak, Ahtisaari mengajak untuk membahas soal hak asasi manusia. Dilanjutkan Ahtisaari mengangkat agenda tentang pengaturan keamanan. Saat GAM mulai susah diajak diskusi lagi, Ahtisaari dengan luwes mengingatkan GAM untuk kembali ke jalur bahwa pertemuan ini adalah untuk mencari solusi damai.

Hari kedua, kembali membahas draft akhir MoU, dan mengangkat agenda mengenai kewenangan pemerintah pusat. Kemudian dilanjutkan dengan agenda partisipasi politik. Di putaran kelima ini Ahtisaari memfasilitasi pertemuan GAM dengan Uni Eropa.

Sejak putaran pertama hingga putaran ketiga, pihak fasilitator, Crisis Management Initiative yang dipimpin oleh Martti Ahtisaari, selalu mengirim para pihak, pemerintah dan GAM, undangan yang tema dan jadwalnya sudah dipatok. Tiap undangan pertemuan untuk tiap putaran, Ahtisaari sudah menjelaskan bahwa semua pembicaraan tentang Aceh, selalu dalam kerangka Otonomi Khusus Aceh, bukan yang lain-lain.

Dengan kerangka yang jelas dan tegas ini, GAM tidak pernah sukses bisa bicara tentang kemerdekaan dalam perundingan. Lebih lanjut, dengan menerima undangan serta substansi bahasan dan datang ke meja perundingan dengan desain seperti itu. GAM secara otomatis sebenarnya sudah tak punya peluang lagi berbicara tentang tuntutan kemerdekaan, kalau tidak mau dikatakan bahwa GAM secara otomatis sudah menerima kenyataan bahwa mereka berada dalam bingkai NKRI.

Ahtisaari ingat bahwa selama proses negosiasi di Konigstedt, ada hari-hari dimana sepanjang hari tidak ada yang terjadi kecuali keresahan tentang apakah pihak akan mencapai kesepakatan sesuai pandangan mereka masing-masing. Perpecahan sering hampir terjadi. Semua yang bisa dilakukan kemudian menunggu dengan sabar, tak seorang pun dapat dipaksa.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Ibid

#### **4.2 . Multi track diplomacy Martti Ahtisaari selama proses mediasi**

Peran mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, selama proses perundingan ini sangat besar. Posisi Ahtisaari ini menjadikan CMI dapat bergerak tidak hanya di jalur *track two* atau *un-official diplomacy* yang lazim digunakan oleh NGO, khususnya dengan pihak GAM dan Jusuf Kalla, tetapi juga, dengan pengalaman, pengaruh dan statusnya sebagai mantan presiden, ia mampu menembus dan memasuki *track one* atau *official diplomacy* di tingkat Uni Eropa maupun PBB dan Amerika Serikat.

Kepemimpinan Ahtisaari dalam memediasi dan memfasilitasi perundingan damai tersebut sangat menentukan. Ia amat tegas dalam memimpin dialog dan penuh siasat untuk mencari solusi bila perundingan mengalami kebuntuan . Ia juga memiliki rencana yang matang pada setiap tahapan perundingan serta beribu jawaban atas segala pertanyaan yang mungkin timbul dari kedua belah pihak. Ia tidak pernah membuka perundingan tanpa mengawalinya dengan rencana dan substansi yang harus dibicarakan.

Wibawanya sebagai mantan presiden sungguh-sungguh mempengaruhi dalam proses mediasi. Bukan hanya dalam meja perundingan, tetapi juga terhadap kalangan para pejabat tinggi di Uni Eropa. Ia selalu berkomunikasi langsung dengan Sekjen PBB, Kofi Annan selama perundingan. Dengan ini semua, ia amat gampang memobilisasi segala keperluan untuk mencapai perdamaian di Aceh.

#### **4.3. Analisa teknik mediasi oleh CMI terhadap konflik Aceh**

Penulis mencoba menganalisa teknik-teknik yang dilakukan mediator dalam mewujudkan perdamaian, berdasarkan bagan di bab 2 mengenai teknik mediator :

##### **4.3.1. Teknik yang berorientasi kepada pihak yang bertikai**

Menurut Martti Ahtisari seorang mediator harus tahu apa yang diinginkannya. Perjanjian damai (MoU) itu dibikin hanya sekitar tujuh halaman, yang merupakan perjanjian ringkas. Ahtisaari tidak percaya dalam perjanjian yang penuh dengan rincian. Kemudian pihak-pihak yang bertikai menemukan diri sendiri dalam situasi melanggar perjanjian. Ahtisaari meyakini perjanjian yang

cukup padat memberikan tanggung jawab kepada pihak yang bertikai untuk menerapkannya dan menyisakan ruang yang cukup untuk menginterpretasikannya.

Ahtisaari juga berpendapat bahwa proses mediasi ini juga benar-benar suatu keajaiban yang tidak disangka dimana perjanjian ini bisa dirampungkan meskipun dalam waktu singkat. Dan itu merupakan prestasi luar biasa Uni Eropa bahwa prosesnya dapat melangkah maju dengan begitu cepat dan fleksibel.<sup>39</sup>

### **Melengkapi diri dengan didukung tim yang lengkap**

Selain pentingnya hubungan baik yang terbina antara pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi, dukungan dari tim juga sama pentingnya bagi mediator. Ahtisaari menyatakan berulang kali dalam beberapa kesempatan betapa sangat penting baginya bahwa sekelompok orang-orang yang terpilih ini yang justru memilih orang yang mendukung jalannya proses perundingan.

Dalam proses mediasi seperti ini, mediator harus melakukan sejumlah besar pekerjaan persiapan mengenai latar belakang konflik. Karena kurangnya waktu, CMI harus mencari cara pintas. CMI mendapatkan seorang ahli tentang konflik Aceh, Dr Timo Kivimäki dari Nordic Institute of Asian Studies di Denmark, untuk memberikan keterangan kepada tim mediator. Dia tahu lebih banyak tentang konflik Aceh dan tim mediator juga diarahkan ke sumber yang tepat,

Kivimäki telah mempelajari cara-cara pemerintah Indonesia dalam negosiasi sejak awal 1990-an dan sangat akrab dengan kendala-kendala yang pada pembicaraan awal Aceh telah mengalami kebuntuan. Dia memberi penjelasan pada anggota tim mediator mengenai hukum di Indonesia, sehubungan dengan pemilihan umum dan mengenai Aceh dan juga menjelaskan masalah karakter tentara kepada anggota tim.

Selain staf sendiri, Ahtisaari membawa orang-orang yang telah ia kenal sebelumnya, yang bagus dan kompeten, yang mana dia bisa bergantung pada orang-orang tersebut pada masa proses negosiasi.

---

<sup>39</sup> Merikallio, Katri. (2006). *Making Peace, Ahtisaari and Aceh*, WS Bookwell Oy

Personil dari kantor Ahtisaari sendiri, Meeri-Jaarva dan Anna Maria Elfving, khususnya, melakukan pekerjaan dasar dan menangani pengaturan praktikal sebelum pertemuan. Jaarva juga memiliki peran sentral dalam merumuskan teks perjanjian. Maria-Elena Cowel menangani hubungan dengan pers.

Wakil Menteri Luar Negeri Hannu Himanen dari Kementerian Luar Negeri, mantan duta besar Finlandia untuk Indonesia juga terlibat sejak awal. Ia hadir dalam sebagian besar putaran perundingan, tapi hanya sebagai pengamat, meskipun keterampilan sebagai diplomat terbukti sangat bernilai dalam situasi kritis. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri lain yang turut berpartisipasi adalah Konselor Anti Vanska, yang diberi tugas memberikan laporan ke Uni Eropa tentang kemajuan perundingan.

Holger Rotkirch, mantan kepala departemen hukum Kementerian Luar Negeri dan sekarang telah pensiun, bergabung dengan proyek ini sebagai penasihat hukum selama musim semi. Pengalaman Rotkirch yang mendalam tentang hukum internasional dan pertanyaan-pertanyaan mengenai hukum sangat penting dalam proyek tersebut. Fakta bahwa Ahtisaari dan Rotkirtch saling mengenal sejak lama membuat kerjasama tersebut semakin mudah.

Keterlibatan Jakko Oksanen juga sangat penting untuk Ahtisaari. Pengalaman prakteknya yang lama di bidang manajemen krisis membuat kontribusinya sangat dibutuhkan. Pekerjaan Martti Ahtisaari sebagai mediator juga mendapat dukungan luar biasa dari Kofi Annan yang kala itu menjabat Sekretaris Jenderal PBB sepanjang proses mediasi berlangsung.<sup>40</sup>

### **Teknik refleksif dengan menggunakan humor dan hal-hal ringan**

Walau Ahtisaari kelihatan tegas dalam memediasi konflik ini, namun, di saat yang sama, Ahtisaari amat bersahabat dengan orang, kendati raut mukanya sangat serius. Ia adalah sosok yang penuh humor. Ia mampu menyampaikan keinginannya dengan berbagai cara jenaka. Begitu juga dalam mencairkan suasana. Ia amat piawai mencari terobosan.

---

<sup>40</sup> Ibid

Sesekali ia mengajak menteri Hamid Awaludin berjalan menelusuri kali kecil yang mengalir di belakang gedung perundingan, lalu berbicara tentang sejarah. Di tengah itu, ia memasukkan keinginannya.

Hal yang sama dilakukan kepada Malik Mahmud dan Zaini Abdullah. Setelah itu, Hamid Awaludin dan Malik Mahmud pun diajak minum bertiga di meja kecil dalam suasana informal dan rileks. Hasilnya, segala persoalan yang membatu bisa mencair dengan mudah.

### **Pemilihan tempat mediasi**

Tempat perundingan dilaksanakan, kota Helsinki, Finlandia. Tidak ada perundingan damai yang dilaksanakan di tempat di mana konflik itu berlangsung.

Perundingan damai selalu dilaksanakan di tempat netral. Finlandia adalah negara yang sangat tidak berpihak. Logika pemerintah dalam konteks ini, sangat masuk akal. Perundingan damai dengan GAM tidak akan mungkin sukses jika diselenggarakan di salah satu tempat dalam wilayah Indonesia. Pihak perunding GAM yang tersebar di berbagai negara, tidak akan mungkin datang berunding, sebab mereka tidak percaya pada pemerintah. Mereka ragu dan khawatir bahwa begitu mereka menginjakkan kaki di bandara, dalam wilayah RI, mereka langsung ditangkap dan dipenjara. Apalagi, ada contoh konkret yang mereka alami. Para perunding mereka, terutama Sofyan Ibrahim Tiba, perunding GAM di Jepang, ditangkap dan dipenjara.

Sebaliknya, pemerintah tidak akan berunding dengan GAM andaikan perundingan tersebut dilaksanakan di Swedia, sebab, pemerintah RI beranggapan bahwa Swedia pasti tidak netral dalam berurusan dengan GAM. Masalahnya, tokoh kunci GAM, Hasan Di Tiro adalah warga negara Swedia. Begitu juga dengan Zaini Abdullah. Bahkan, Malik Mahmud, kendati masih warga negara Singapura, tetapi sudah berstatus permanen residen di Swedia.

Tempat perundingan itu amat menentukan. Penentuan lokasi perundingan, sebenarnya banyak kaitannya dengan mediator, Martti Ahtisaari, yang pernah menjadi Presiden Finlandia. Selama perundingan berlangsung, tidak pernah ada gangguan sedikit pun yang kami alami. Masing-masing pihak juga memperoleh perlakuan yang sama dari pihak pemerintah Finlandia.



#### 4.3. 2. Teknik untuk sasaran hubungan antar pihak-pihak yang bertikai

MA merefleksikan bagaimana seorang mediator mengatur untuk mencari kompromi dalam situasi di mana para pihak yang bertikai terlihat begitu berseberangan. Terutama pada tahap awal, dia yakin, hal yang paling penting adalah hanya bertemu dan berbicara, bertemu lagi dan berbicara lagi. (berdasarkan *minutes of meeting*, putaran pertama, hari kedua, sesi pertama, terlihat MA menyuruh kedua belah pihak banyak bertemu.)<sup>41</sup>

Ahtisaari berpendapat, semakin banyak perbedaan yang dapat dihilangkan melalui tatap muka, pihak yang bertikai akan semakin jelas mulai membentuk gambaran tentang apa solusi alternatif realistis dan apa yang tidak realistis. Juga dari sudut pandang yang lain.

Menurut Ahtisaari, tidak ada gunanya, misalnya, mengharapkan 2,000 penjaga perdamaian. Pertama-tama, karena tidak akan ada yang menyediakan pasukan penjaga perdamaian tersebut dan, kedua, sebanyak apapun jumlah pasukan perdamaian tetap tidak akan dapat membawa keamanan jika para pihak-pihak yang bertikai tidak siap untuk berdamai. Penjaga perdamaian internasional tidak dapat melakukan fungsi pemerintahan dan ini bukan jenis konfigurasi harus selalu menjadi jalan keluar dari konflik. Ahtisaari menyatakan, semua tergantung juga pada hubungan baik yang terbina antara pihak-pihak yang saling berseberangan. Yang dilakukan Ahtisaari adalah mencoba untuk mencari solusi yang kedua pihak dapat melanjutkan kehidupannya.

Sebagai mediator, beliau sudah menetapkan agenda pembicaraan dari awal dan sudah mempunyai tujuan tersendiri dalam memediasi mengenai kasus Aceh bahwa tidak ada agenda pembicaraan mengenai merdeka. Ahtisaari selalu mengarahkan pembicaraan kembali ke agenda yang sebenarnya kalau ada pihak yang mulai melenceng dalam pembicaraan.

Sekali waktu, dalam putaran pertama perundingan, Nur Djuli, juru runding GAM, masih selalu menyinggung tentang kemerdekaan GAM. Ahtisaari dengan tegas berkata :

---

<sup>41</sup> Awaludin, Hamid. (2008), *Damai di Aceh, Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki*, CSIS

*“Jika Anda tak punya sesuatu untuk dibicarakan seperti tawaran pemerintah, sekali lagi, lebih baik Anda meninggalkan ruangan ini. Tak ada alasan untuk berdiskusi dengan Anda semua. Jika Anda tak menyenangi agenda yang saya tawarkan, adalah hak Anda, dan saya bergembira jika Anda tinggalkan ruangan ini dan tak pernah balik lagi kepada saya. Anda hanya membuang-buang waktu saya. Tapi ingat, kalian tak akan pernah dapatkan dukungan internasional. Saya sudah tegaskan dan jelaskan sebelumnya bahwa pembicaraan kita adalah soal otonomi khusus. Inilah kerangkanya. Ingat, sebelum Anda meninggalkan ruangan ini, saya ingin mengatakan bahwa mimpi Anda untuk merdeka tidak akan pernah kesampaian. Paling tidak, selama saya masih hidup atau Anda masih hidup. Saya akan menggunakan semua pengaruh saya agar Anda tidak dapatkan dukungan apa pun di dunia internasional” (Berdasarkan minutes of meeting putaran pertama, hari pertama, sesi ketiga)<sup>42</sup>*

Lalu, Ahtisaari menyambung, *“Karena kalian tidak ada yang mau meninggalkan ruangan, berarti kalian masih mau berunding. Kita mulai perundingan lagi.”*

Martti Ahtisari dari awal benar-benar mengikuti kerangka negosiasi yang sudah ditetapkan mengenai otonomi. Saat putaran kedua pertemuan MA dengan delegasi RI, MA mengatakan, *Tak ada pembicaraan tentang referendum di sini. Tetapi keterlibatan semua rakyat dalam masyarakat demokratis. Jangan ada lagi penyelundupan agenda referendum dari LSM. Saya tidak mau itu. (Berdasarkan minutes of meeting, putaran kedua, hari pertama, 21 Februari 2005)<sup>43</sup>*

### **Format Dialog**

Tidak seperti perundingan sebelumnya yang difasilitasi oleh Henry Dunant Centre (HDC). Kali ini, pihak pemerintah dan GAM, bertemu langsung di sebuah meja perundingan. Tak ada perantara yang menyampaikan masing-masing pesan. Dengan demikian, tak ada pesan yang disensor untuk menjaga jangan ada yang tersinggung.

---

<sup>42</sup> ibid

<sup>43</sup> ibid

Pertemuan langsung memang amat efektif sebab selain masing-masing pihak mendengar secara langsung, segala rencana dan isi pikiran dapat dengan mudah dikemukakan.

Format pertemuan langsung ini memang amat efektif untuk menjembatani sebuah jurang yang menganga lebar. Hal yang mengganjal yang dimiliki oleh kedua belah pihak, bisa dengan gampang dituangkan, dan dengan mudah pula dijawab oleh pihak lain. Sehingga bisa tercapai persamaan persepsi. Singkatnya, semua unek-unek diungkapkan di atas meja perundingan. Tak ada yang disembunyikan. Sehingga segala persoalan bisa dipecahkan.

Keuntungan lain dari format pertemuan langsung ini, kedua pihak bisa dengan mudah minta pertemuan diskors untuk lobi, kapan saja, manakala ada hal yang membutuhkan penanganan khusus melalui mekanisme lobi. Kedua belah pihak juga dengan gampang meminta menunda membicarakan agenda tertentu yang ada dalam jadwal, manakala agenda tersebut dinilai masih terlampau sensitif dibicarakan pada sesi tersebut.

### **Bahasa dan Netralitas Mediator**

Dalam negosiasi perdamaian ini, CMI dibantu oleh Juha Christensen, seorang akademisi berkebangsaan Finlandia yang sempat mengajar di Universitas Hasanuddin, Makasar yang juga bekerja di NGO Interpeace. Christensenlah awalnya yang mempertemukan pemerintah Indonesia dengan CMI dan merekomendasikan CMI sebagai mediator. Christensen juga memainkan peran yang penting selama proses negosiasi. Dia memelihara hubungan yang dekat dengan kedua belah pihak baik negosiasi. Dia menengahi, membujuk, berbicara setiap kali diperlukan. Christensen telah membantu mengatasi banyak kesulitan untuk membuat kontak negosiasi dengan kedua belah pihak. Walaupun ia tidak bisa telah mulai melakukan negosiasi sendiri, karena CMI dan Christensen saling membutuhkan.

Fakta bahwa Christensen dapat berbicara bahasa yang sama dengan pihak yang bertikai, menjadi keuntungan besar dalam proses negosiasi. Ketika Ahtisaari menyarankan kepada pihak yang bertikai untuk mulai berbicara satu sama lain

dalam bahasa mereka sendiri tanpa Ahtisaari, pihak yang bertikai langsung menerima hal tersebut dan Juha menjadi 'wasitnya'."

Kehadiran Christensen di setiap pertemuan bilateral, membuat Ahtisaari selalu tahu apa yang terjadi pada mereka. Tetapi ketika seseorang dekat dengan kedua belah pihak, dan mendapatkan emosi yang kuat: maka akan muncul ketidakpercayaan, kecemburuan dan kecurigaan. Dalam hal ini Ahtisaari sering memperingatkan Christensen, untuk menjaga kenetralitasan terhadap pihak-pihak yang bertikai. Karena ketika seseorang sangat dekat dengan kedua belah pihak, pertanyaan dan iri hati bisa muncul di dalam pikiran mereka. Bisa jadi ada pihak yang cemburu, sehingga bisa membuat pekerjaan yang sulit.

Ini merupakan bagian dari proses ini yang terkadang salah satu pihak tidak percaya, kadang-kadang pihak yang lain tidak percaya. Ahtisaari mempunyai pengalaman yaitu saat beliau dalam situasi di mana tidak ada yang dipercaya siapa pun, namun pekerjaan tetap harus dilakukan. Ada tahap-tahap yang sama yang terjadi dalam setiap proses negosiasi. Mediator harus tahu mengenai hal itu dan harus siap dengan hal itu. Di sisi lain, kenyataan bahwa pihak-pihak menerima keterlibatan orang luar, menunjukkan kepada Ahtisaari bahwa mereka benar-benar menginginkan perdamaian. Dan meyakinkan Ahtisaari bahwa proyek mediasi itu akhirnya bisa berhasil.

Yang sangat penting bagi Ahtisaari bahwa Jaako Oksanen dan Juha Christensen juga siap ambil bagian dalam AMM. Karena Christensen menghadiri semua negosiasi sehingga ia selalu akan tahu apa yang telah disepakati di dalamnya. Sedangkan rencana pemantauan, merupakan rencana dan rancangan dari Oksanen.

Ahtisaari mengakui dalam proses negosiasi ada saat-saat ia harus sangat ketat dan keras. Misalnya. Ahtisaari mengatakan kepada GAM jika mereka tidak segera menangkap kesempatan perdamaian ini, mereka tidak pernah mungkin akan kembali ke rumah mereka di Aceh. Banyak waktu terbuang di awal negosiasi akibat bertubi-tubi menuntut gencatan senjata GAM dan pemerintah bahkan menolak untuk membahasnya.

Ahtisaari tahu bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menerima gencatan senjata. GAM telah melakukan pengadaan senjata tambahan dan merekrut

pejuang baru selama proses COHA, walaupun ini jelas bertentangan dengan ketentuan gencatan senjata. Kekhawatiran GAM adalah mereka merasa tidak bisa mendapat jaminan bahwa pemerintah Indonesia di masa depan tidak akan mengubah apa yang sekarang disepakati.

Ahtisaari mencoba menjelaskan bahwa tidak ada jaminan yang dapat diberikan. Tetapi lebih kepada membiarkan demokrasi bekerja dengan semestinya. Ahtisaari meyakinkan pihak GAM, bahwa perjanjian perdamaian tersebut telah menjadi kewajiban nasional dan jika salah satu pihak mulai berusaha untuk mengubah hal itu, maka Ahtisaari juga akan ikut campur.

GAM juga sangat khawatir tentang apa yang akan terjadi jika DPR menolak untuk mengadopsi undang-undang baru tentang pemerintahan Aceh. Namun, Ahtisaari tidak percaya bahwa ini akan menjadi masalah. Indonesia cukup demokratis dan pihak mediator percaya bahwa undang-undang tersebut akan diterima. Pemimpin pemerintah Indonesia sangat berkomitmen untuk proses perdamaian dan telah menetapkan tentang membangun model baru untuk proses tersebut. Ahtisaari mengatakan, dia telah belajar selama bertahun-tahun untuk membaca hal-hal kecil. Apa yang tersirat, dan apa yang tidak tersirat.

Sikap elegan dari pihak GAM menerima untuk mengatur tanggal penandatanganan perjanjian perdamaian agar Indonesia setelah itu segera bisa merayakan 60 tahun kemerdekaannya dengan damai. Hal semacam ini memperkuat keyakinan bahwa pihak pemerintah Indonesia cukup serius. Ahtisaari meyakinkan kedua belah pihak bahwa negosiasi untuk perdamaian tidak bisa secepat itu juga, bagaimanapun, bernegosiasi tetap harus terus dilakukan mengenai segala hal yang menyangkut berbagai segmen masyarakat.

Salah satu hal yang dibicarakan secara teknis yang membantu mengubah suasana konflik sama seperti di beberapa negara atau lainnya, seperti misalnya membahas tentang situasi di mana polisi tidak bisa sewenang-wenang menangkap seseorang atau tentara memukuli orang lain, melainkan setiap orang harus bisa merasa aman. Seorang mediator harus mampu menciptakan suasana di mana semua orang dapat berpartisipasi melangkah dalam negosiasi.

Seorang mediator yang baik memiliki berbagai peran dalam berbagai tahapan proses. Dalam pandangan Ahtisaari, mediator sering seperti pilot

pelabuhan:

Segera setelah proses negosiasi telah disimpulkan, tahap baru dimulai yaitu hubungan yang baru. Seorang mediator yang baik juga tahu kapan waktu yang baik untuk mundur.

Ahtisaari selalu menekankan kepada pihak yang bertikai bahwa perjanjian perdamaian itu adalah perjanjian di antara mereka. Pada dasarnya tidak ada pihak luar yang dapat ikut campur di dalamnya. Tujuannya Ahtisaari adalah agar membawa kedua belah pihak untuk masing-masing lebih independen dan sehingga pada akhirnya pihak yang bertikai dapat 'melepaskan pegangan' mereka dari pihak mediator

Menurut Ahtisaari, mediator yang memaksakan keinginan sendiri dalam proses negosiasi tidak akan bisa menjadi pendamai yang baik. Kepuasan harus datang dari pihak yang bertikai. Sejak CMI didirikan pada tahun 2000, Ahtisaari telah menyadari untuk mencoba melakukan keterampilan negosiasi sendiri.

Proses perdamaian ini juga dapat berlangsung karena pendanaan untuk proses perdamaian Aceh datang dari Komisi Uni Eropa dan pemerintah Finlandia, Belanda dan Swiss juga menyumbang jumlah kecil.<sup>44</sup>

#### 4.3.3. Teknik mengenai hubungan dengan pihak lain selain mediator

Sikap tegas Ahtisaari, juga ditunjukkan kepada Damien Kingsbury, penasehat politik GAM asal Australia. Saat itu, para juru runding GAM tak mampu mengartikulasikan keinginannya dalam meja perundingan. Maka mereka izin untuk meminta Kingsbury ikut menjelaskan. Karena sikap Kingsbury yang selalu serba tahu dan memaksakan kehendak, Ahtisaari pun menunjukkan sikap yang tegas. "Saya kira saudara Kingsbury sangat paranoid. Anda datang ke tempat ini bukan untuk menggurui kami. Masalah konstitusi Indonesia sudah diterangkan oleh Menteri Awaludin, dan Anda bukannya mencari solusi, tetapi Anda adalah persoalan itu sendiri," kata Ahtisaari. (*Minutes of meeting*, putaran keempat, hari kedua)

---

<sup>44</sup> Merikallio, Katri. (2006). *Making Peace, Ahtisaari and Aceh*, WS Bookwell Oy. 138 - 142

Prinsip-prinsip dan strategi yang ditekankan oleh Ahtisaari dalam mediasi ini adalah sebagai berikut :

- Prinsip ketidakterikatan, artinya sebelum ada kesepakatan dalam pembahasan antara RI-GAM maka kedua belah pihak tidak terikat atas substansi kesepakatan
- Kedua belah pihak dilarang melakukan konferensi pers sebelum pihak CMI melakukan keterangan pers. Tujuannya agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memahami dinamika perundingan, dan tidak ada klaim satu pihak terhadap pihak yang lain.
- Ketiga adalah model perundingan yang dianut oleh CMI yang berhasil mempertemukan kedua belah pihak untuk duduk satu meja perundingan (*face to face*). Hal ini dapat dilakukan karena keduanya percaya terhadap CMI.
- kedua belah pihak tidak dapat menghentikan perundingan secara sepihak. Hanya CMI yang dapat menentukan suatu perundingan gagal atau terus dilanjutkan.
- agenda ditentukan secara bersama dan disusun oleh mediator.
- lobi personal yang intensif, pendekatan personal yang dilakukan oleh Ahtisaari kepada kedua belah pihak, dimana, ada saat-saat beliau bertemu dan berbincan-bincang dari hati ke hati

Adapun faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan dari mediasi ini hubungan dekat Martti dengan negara-negara Uni Eropa pada umumnya dan Swedia pada khususnya.

CMI berusaha untuk melakukan inisiatif-inisiatif perdamaian yang ditujukan untuk mengakhiri internal konflik di Indonesia. Aktivitas yang dilakukan oleh CMI sebagai mediator meliputi : preparasi atau mempersiapkan proses negosiasi. Di sini CMI berhasil melakukan kontak secara personal dengan pimpinan pasukan pemberontak GAM, wakil pemerintah Indonesia. Karena pertemuan tersebut mengindikasikan adanya kemauan serta keinginan suka rela dari pihak yang berkonflik untuk bersedia dipertemukan dan berunding bersama, maka mediator membawa pihak yang berkonflik tersebut ke perundingan yang lebih formal atau resmi.

Pada tahap selanjutnya, CMI melakukan inisiatif-inisiatif perdamaian berdasarkan kerangka kerja yang telah ditetapkan CMI. Mereka bertemu dan melakukan diskusi, mengakses proses perdamaian dan menghasilkan komentar serta rekomendasi pada draft kesepakatan perdamaian.

Setelah ada indikasi pihak-pihak yang bertikai bersedia berunding bersama, maka mereka melakukan proses negosiasi, CMI mempengaruhi diskusi secara langsung dan memimpin perundingan. Pihak-pihak yang bertikai dipertemukan secara langsung (*face to face*).

Pada mulanya kedua belah pihak (RI-GAM) memiliki posisi yang saling berseberangan dan bertentangan. Pemerintah RI menghendaki penyelesaian separatisme Aceh dalam kerangka otonomi khusus; sedangkan pihak GAM tetap menuntut kemerdekaan (*self-determination*).

Perundingan tersebut sempat mengalami banyak kendala karena pihak pemberontak GAM tetap mengajukan tuntutan untuk merdeka. Tuntutan dari para pimpinan pemberontak GAM tersebut telah mengakibatkan pembicaraan mengalami kebuntuan sehingga hal ini sempat membuat terhentinya proses perundingan. Di dalam negosiasi kebuntuan merupakan hal yang wajar terjadi, maka dalam hal ini peranan mediator dalam hal ini CMI amat sangat penting untuk melakukan tawar menawar dengan kedua belah pihak. Hambatan ini berhasil dilampaui oleh Martti Ahtisaari pada saat melakukan perjanjian dengan pihak GAM. Karena pihak GAM mau menurunkan tuntutan politiknya dari kemerdekaan (*self-determination*) menjadi pemerintahan sendiri (*self-government*) dengan sejumlah kompensasi yang menyertainya.

Akhirnya para pemberontak menurunkan tuntutannya atas keinginan untuk merdeka. Dalam konflik di Aceh, pihak-pihak yang saling bertikai membuat permintaan-permintaan yang berhubungan dengan konflik yang ada, melakukan proses tawar menawar dengan membuat kompromi, yang membantu CMI di dalam proses tawar menawar sehingga tidak ada lagi perbedaan diantara mereka. Kemudian persetujuan bisa disepakati atas usaha bersama dari pihak-pihak yang terlibat konflik. perjanjian damai yang dicapai tersebut di tandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki di Finlandia.



Namun perjanjian damai yang telah dicapai tidak ada artinya jika legitimasi terhadap kesepakatan perdamaian tidak ada. Sebagai upaya untuk mencapai perdamaian abadi di Aceh, maka dalam perjanjian damai disepakati Uni Eropa akan mengirimkan wakil-wakilnya melalui AMM (Aceh Monitoring Mission) untuk melakukan pengawasan/monitoring terhadap kesepakatan perdamaian, termasuk menerapkan sanksi-sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar perjanjian perdamaian tersebut.

Perjanjian damai Helsinki telah mengakhiri konflik tiga puluh tahun bersenjata lama yang telah mengakibatkan hampir 15,000 kematian. Perubahan dalam lingkungan politik di Aceh telah dilihat sebagai pengembangan masa depan Aceh dan sebagai harapan terbaik bagi perdamaian di Aceh untuk tahun-tahun ke depan. Kegagalan dari Cessation of Hostilities Agreement (COHA) 2002 - 2003 telah memetik pelajaran. Perjanjian Helsinki ini tampaknya merupakan strategi yang lebih komprehensif untuk membawa perdamaian ke Aceh, dengan memperhatikan banyak faktor, seperti faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi yang tetap membuat Aceh dalam keadaan perang terus-menerus sejak kegagalan perjanjian terakhir, dianggap selama ini tidak tertangani sepenuhnya.

#### **Analisa dari permasalahan penelitian**

Konflik yang terjadi di Aceh, berhasil membantah pandangan kelompok realis, yang menyatakan perdamaian yang lebih bertahan lama seringkali dihasilkan dari kemenangan secara militer dibandingkan dengan negosiasi damai. Dalam konflik Aceh kita bisa melihat, bahwa cara militer selama bertahun-tahun yang diterapkan oleh pemerintah RI ternyata tidak dapat mewujudkan perdamaian di Aceh.

Pernyataan kelompok realis juga mengatakan intervensi pihak ketiga hanya akan memperpanjang penderitaan juga dapat dipatahkan. Dengan hadirnya CMI sebagai mediator, ternyata dapat mewujudkan perdamaian di Aceh dan mampu menyelesaikan sampai ke akar permasalahan.

Hal ini sekaligus mematahkan pandangan para pemikir NeoMarxist dan pemikir-pemikir radikal melihat seluruh usaha resolusi konflik sebagai sesuatu pandangan yang keliru, karena resolusi konflik berusaha mendamaikan benturan

kepentingan yang sebenarnya tidak dapat direkonsiliasi. CMI dengan segala kemampuannya, dapat mendamaikan kepentingan yang berbeda dari pihak-pihak yang bertikai, termasuk menurunkan permintaan GAM yang awalnya menuntut kemerdekaan dari RI menjadi otonomi sendiri.

### **Analisa berdasarkan teori Kressel dan Pruitt (1989)**

Mediasi adalah bantuan kepada dua atau lebih pihak yang sedang bertikai (Kressel and Pruitt 1989) oleh pihak ketiga yang (biasanya) tidak punya otoritas untuk memaksakan hasil. Dalam mediasi ini dapat dilihat bahwa CMI tidak memaksakan hasil dari mediasi, tetap memberikan rekomendasi dan memakai teknik mengajukan pertanyaan kepada kedua belah pihak. Dan hasil dari mediasi adalah karena kesepakatan kedua belah pihak, mengenai ekonomi, pemerintahan, HAM, reintegrasi, dan lain-lain merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak dan bukan paksaan dari CMI.

Dari sisi perkembangan studi Hubungan Internasional, adanya upaya dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan konflik internal di Aceh melalui jalan perundingan yang mengundang keterlibatan aktor-aktor internasional baik negara-negara asing maupun aktor non-negara khususnya organisasi non-pemerintah internasional (international NGOs). Di sini kita dapat melihat baik globalisasi bisa memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap dinamika konflik serta resolusi konflik di negara-negara di dunia khususnya di Indonesia. Ternyata penyelesaian konflik internal bisa dibantu oleh aktor lain di luar negara yang bertikai. Sehingga kita bisa mengembangkan studi HI mengenai resolusi konflik untuk digunakan lebih lagi dalam menangani konflik-konflik internal. Sudah seharusnya para penstudi Hubungan Internasional mempelajari *intra-state conflict* atau konflik internal mengingat implikasi internasionalnya yang begitu nyata dan luas. Pendekatan lintas disiplin sangat bermanfaat dan produktif menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

**Tabel**  
**Ringkasan Proses dan Dinamika Pembicaraan Damai antara RI-GAM**

Babak Pertemuan	Gagasan Pemerintahan SBY-JK	Respon Pihak GAM	Dinamika Pertemuan	Solusi CMI	Hasil Kesepakatan
Putaran Pertama (28-31 Januari 2005)	Posisi Dasar Pihak RI: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian Aceh melalui otonomi khusus</li> <li>2. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia</li> <li>3. Bersifat informal (dan tidak ada internasionalisasi)</li> </ol>	Posisi Dasar Pihak GAM : Menolak tawaran otonomi khusus, tetap mengajukan konsep "self-determination", atau kemerdekaan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertemuan hari pertama mendekati dead lock (jalan buntu), karena kedua belah pihak tetap pada posisi dasar mereka, menuntut posisi yang menjadi perjuangannya</li> <li>2. Belum ada kesepakatan apa pun dalam perundingan tahap pertama</li> </ol>	Ketika situasi hampir mengalami jalan buntu, CMI-Martti Artikaasari memberikan solusi: Pembicaraan dimulai dari aspek yang ringan-ringan terlebih dahulu, tidak mencakup substansi dari tuntutan kedua belah pihak	Belum ada hasil yang disepakati pada putaran I
Putaran Kedua (21-23 Februari 2005)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Indonesia melakukan protes atas pelibatan 2 orang Warga Negara Australia sebagai "Advisor" GAM yaitu Damien Kingsbury</li> <li>2. Protes atas serangan terhadap Satuan Zeni TNI-AD yang melaksanakan tugas kemanusiaan</li> <li>3. Posisi Indonesia tetap sama menegaskan bahwa penyelesaian Aceh melalui Otonomi Khusus</li> </ol>	Pada putaran II ini posisi GAM adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GAM tidak bersedia menggunakan terminologi otonomi khusus, menuntut pemberlakuan status quo untuk peluang penyelesaian baru</li> <li>2. menuntut pemberlakuan cease fire dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. terjadi deadlock, bahkan juru runding RI akan meninggalkan pertemuan, karena mereka sudah memesan tiket ke Jakarta.</li> <li>2. Martti Ahtisaari sebagai juru runding marah atau kecewa terhadap pihak GAM yang masih menuntut kemerdekaan</li> </ol> <p>Pada hari kedua, terjadi perubahan sikap GAM yaitu:</p>	Pihak CMI sebagai negosiator khususnya Martti Ahtisaari kecewa dengan pihak GAM (bahkan sepat gusar) dan menekan agar pihak GAM bersedia berunding dalam kerangka otonomi khusus yang ditawarkan. Mulai ada kepercayaan dengan berbagai pihak, sehingga pada putaran kedua, format perundingan diubah dengan menggunakan	Hingga akhir putaran kedua ini belum ada kesepakatan apa-apa antara RI dan GAM. Yang muncul adalah kesediaan GAM mempelajari usulan kerangka otonomi khusus pihak RI dan adanya pembicaraan atas wacana self-government

		<p>menghadirkan Polisi Internasional serta menuntut Aceh sebagai "Demilitarized Zone"</p> <p>3. Meminta pembebasan semua tahanan politik</p> <p>4. Masalah Aceh adalah masalah internasional. Pihak GAM, khususnya Nurdin Abdurrahman dan Damien Kingsbury telah menyiapkan tiga program sebagai agenda utama pihak GAM dalam konsep self-government</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersedia menanggapi/membahas posisi dasar Pemerintah RI dan agenda pertemuan lainnya</li> <li>2. Menanggapi substansi "Otonomi Khusus yang dipaparkan juru runding RI</li> <li>3. Meminta tanggapan terhadap wacana "self-government"</li> </ol>	<p>bahasa Melayu yang difasilitasi oleh Juha Cristensen</p>	
<p>Putaran Ketiga (12-16 April 2005)</p>	<p>Pada putaran ketiga ini, kedua belah pihak sepakat meninggalkan terlebih dahulu konsep otonomi khusus dan self-government, tetapi membicarakan agenda-agenda yang lebih memungkinkan bagi Aceh masa depan seperti partai politik, keuangan dan perdagangan, perpajakan, security agreement, amnesty, demobilisasi dan pelanggaran HAM, dan outside monitoring</p>		<p>Wacana perubahan self-determination menjadi self-government sudah dimunculkan oleh pihak GAM sebagai jalan bagi penyelesaian Aceh.</p>		<p>Terhadap otonomi khusus dan self government belum ada kesepakatan substansial, tetapi terhadap isu-isu keamanan, keuangan</p>

				dan ekonomi, outside monitoring telah ada titik temu antar-kedua belah pihak. Masalah partai politik local masih menjadi titik krusial perundingan
Putaran Keempat	Pembahasan sudah melunak dengan mulai adanya pembahasan masalah “partisipasi politik dan keamanan “by rebels” dalam kerangka “self-government. Masalah yang paling a lot untuk dibahas adalah persoalan penerjemahan self-government, khususnya mengenai partai politik lokal		Pihak CMI menawarkan untuk menyusun draft MoU yang akan menjadi agenda pembicaraan pada putaran perundingan berikutnya (terakhir)	Belum ada kesepakatan tentang substansi self-government, dan Masalah partai politik local masih menjadi titik krusial perundingan.
Tahap antara	CMI menyusun proposal dan agenda yang akan menjadi draft untuk dibicarakan dalam perundingan tahap akhir (kelima). Agenda-agenda pembicaraan inilah yang kemudian menjadi draft awal MoU Helsinki dari CMI.			
Putaran Kelima (12-17 Juli 2005)	Agenda pembicaraan adalah penarikan mundur kekuatan bersenjata kedua belah pihak, pengaturan pemberian amnesty dan kompensasi ekonomi untuk GAM. Pada pertemuan ini draft Memorandum of Understanding (MoU) telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, dari dinamika yang terjadi, tampak menonjol bahwa persoalan partai politik local merupakan agenda yang paling rumit dan masih belum memperoleh persetujuan dari Pemerintah RI. Perundingan bahkan sempat terhenti selama hampir tiga jam, baru setelah ada kepastian dari Jusuf Kalla mengenai masalah partai local perundingan dapat berjalan kembali hingga pada hari terakhir.	Perundingan tahap kelima dalam membahas draft MoU yang disusun oleh CMI hampir deadlock, berada pada titik kritis, karena perbedaan mengenai tuntutan GAM atas partai politik local yang masih belum disetujui oleh Pemerintah RI.		Hasil kesepakatan adalah adanya penyempurnaan draft MoU yang disusun oleh CMI yang telah diparaf oleh kedua belah pihak untuk ditandatangani pada Agustus 2005

#### **4.4. Hasil dari mediasi Aceh**

Berdasarkan tabel dalam bab 3, adapun hasil dari mediasi Aceh yang dilakukan oleh CMI adalah sebagai berikut :

##### **4.4.1 Bagi pihak-pihak yang bertikai**

Ada kesepakatan damai berupa Memorandum of Understanding (MOU), kedua belah pihak puas dengan hasil yang telah disepakati, hubungan antara kedua belah pihak menjadi baik, pembahasan mengenai keadilan dituangkan dalam MoU pasal 2 mengenai hak asasi manusia, poin 2.2. Sebuah Pengadilan Hak Asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.

##### **4.4.2 Bagi mediator**

Dengan berhasilnya CMI menghantarkan Indonesia dan GAM untuk mencapai kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005, maka secara otomatis telah meningkatkan status CMI di mata dunia internasional sebagai suatu organisasi yang mampu menyelesaikan konflik internal yang terjadi di suatu negara. Ahtisaari telah menerima ucapan selamat dari Sekretaris Jenderal PBB dan lainnya tingkat tinggi para pengambil keputusan tingkat tinggi lainnya. Ahtisaari cukup puas dengan hasil akhir.

#### **4.5. Mediasi yang efektif**

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, bagaimana mediasi yang efektif yang dilakukan oleh Crisis Management Initiative dalam menangani konflik di Aceh? Ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan pihak ketiga sebagai mediator dalam suatu resolusi konflik. Menurut Marvin Ott keberhasilan ini tergantung pada faktor kapabilitas mediator, yang terdiri dari :

1. ketidakberpihakan dalam isu yang mejadi sengketa
2. independensi dari pihak-pihak yang bertikai
3. penerimaan dari pihak-pihak yang bertikai
4. dihormati oleh pihak-pihak yang bertikai
5. memiliki kemampuan untuk memberi tekanan terhadap salah satu atau kedua belah pihak (*leverage*)
6. pengetahuan dan keahlian mediator dalam memecahkan masalah

7. kepemilikan sumberdaya fisik yang dibutuhkan (misalnya tempat rapat, fasilitas transportasi dan komunikasi, sumberdaya manusia untuk keperluan inspeksi dan verifikasi

Dalam proses mediasi konflik Aceh ini kita bisa melihat bahwa mediator tidak berpihak kepada siapapun baik pemerintah RI maupun GAM, kedua belah pihak yang bertikai masing-masing dianggap independen. Mediator dalam hal ini, diterima dan dihormati oleh kedua belah pihak, karena dari awal juga telah menjadi kesepakatan bersama dalam menunjuk CMI sebagai mediator. Pada saat-saat diperlukan, mediator memiliki kemampuan memberikan tekanan terhadap kedua belah pihak untuk menegaskan kembali komitmen awal untuk mewujudkan perdamaian.

Seperti dalam teori yang sebelumnya dijabarkan dalam bab 3 bahwa strategi mediasi yang berhasil (seperti disebutkan dalam bab yang sebelumnya) memiliki lima elemen ; *coherence, complexity and coordination, consistency and staying power, capacity and competence, commitment to using preventive diplomacy*. Ahtisaari memiliki strategi mediasi yang baik dimulai dengan rencana yang cermat dan satu set tujuan yang jelas. Beliau menyelesaikan sebagian besar konflik ini dengan memanfaatkan keterlibatan, dan koordinasi antar, beberapa lembaga, institusi dan orang-orang yang bisa diandalkan di bidangnya masing-masing selama siklus hidup konflik. Ahtisaari konsisten dalam menjalankan misi dan mencapai tujuannya untuk mewujudkan perdamaian menjamin kontinuitas selama periode pelaksanaan. Mediator dalam hal ini dinilai benar-benar siap untuk menjalankan tugas bagi upaya mewujudkan perdamaian dimana perdamaian tersebut berhasil. Komitmen untuk menggunakan diplomasi preventif untuk menyelesaikan konflik, ditunjukkan dengan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Uni Eropa.

Asumsi awal dari penulis keberhasilan mediasi ini dan benturan kepentingan yang berbeda antara GAM dan pemerintah RI dapat dipersatukan adalah karena mediator bisa melakukan *multi track diplomacy*. Setelah melalui studi ternyata proses mediasi ini dinilai efektif tidak hanya karena Martti Ahtisaari bisa menembus *track one diplomacy* dan *track two diplomacy* di saat yang

bersamaan, tetapi juga karena teknik-teknik yang dipakai oleh MA sebagai pimpinan tim mediator. Mediasi ini bisa dibilang efektif karena :

1. dalam waktu yang singkat, kesepakatan untuk berdamai bisa terwujud (dalam hitungan waktu 8 bulan, sejak ronde pertama)
2. tidak mendapatkan pengaruh dari pihak luar yang tidak diinginkan, karena kedua belah pihak yang bertikai diminta untuk tidak berbicara kepada pers selama proses mediasi berlangsung.
3. kerja dari pihak mediator sangat efektif, karena dengan memperhitungkan waktu yang amat singkat, Martti sebagai Chairman CMI, membentuk tim yang lengkap dan menempatkan orang-orang yang tepat sesuai fungsinya, yang bisa mendukung pekerjaan CMI dalam memediasi konflik Aceh.
4. pertemuan yang dilakukan *face to face* tanpa perantara yang mengantarkan pesan-pesan dari kedua belah pihak, membuat kedua belah pihak yang bertikai bisa mengungkapkan unek-unek secara langsung, sehingga dalam waktu yang singkat bisa didapatkan persamaan persepsi kedua belah pihak.
5. tidak ada *third party*/pihak lain selain orang-orang yang sudah ditetapkan dari awal
6. CMI bisa memediasi tawaran RI untuk otonomi khusus kepada GAM tanpa keluar dari kerangka NKRI. Dan GAM juga bisa menurunkan tuntutan mereka dari kemerdekaan dari Indonesia menjadi otonomi.

Dalam resolusi konflik untuk mewujudkan perdamaian di Aceh, telah memenuhi tiga unsur penting seperti pandangan Peter Wallensen yaitu pertama, adanya kesepakatan yang biasanya dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang ditandatangani dan menjadi pegangan selanjutnya bagi semua pihak berupa Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditandatangani oleh GAM dan pemerintah RI. Kedua, setiap pihak menerima atau mengakui eksistensi dari pihak lain sebagai subyek, telah ditunjukkan oleh sikap pemerintah RI yang mau menerima GAM dengan bertemu dan mengadakan negosiasi dan begitu juga sebaliknya, sehingga mereka bisa bekerjasama dalam putaran-putaran negosiasi selanjutnya untuk menyelesaikan konflik secara tuntas. Ketiga, pihak-pihak yang bertikai juga sepakat untuk menghentikan segala aksi kekerasan sehingga proses



pembangunan rasa saling percaya bisa berjalan sebagai landasan untuk transformasi sosial, ekonomi dan politik yang didambakan. Selama proses negosiasi berlangsung, pihak-pihak yang bertikai benar-benar menghentikan segala aksi kekerasan sehingga rasa saling percaya antara keduanya menjadi terbangun.

#### **4.6. Indikator keberhasilan CMI**

MoU ini adalah kesepakatan yang baik. Karena kesepakatan ini menciptakan kerangka kerja bagi pemerintah dan masyarakat. Ada banyak hal di dalamnya yang tidak mudah dijalankan baik bagi pemerintah dan juga untuk GAM. Namun pasca MoU hampir semua yang tertera dalam butir-butir MoU telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Adapun indikator dari keberhasilan mediasi oleh CMI ini adalah sebagai berikut :

1. Konflik kekerasan yang terjadi selama ini antara pemerintah RI dan GAM telah berhenti.
2. Tahapan-tahapan menuju *peace reconstruction* terjadi
3. *Decommissioning* atau penarikan senjata dari GAM oleh anggota AMM telah dilakukan. *Decommissioning* ini dilakukan dalam 4 tahapan di berbagai daerah di Aceh.
4. Pemilihan daerah bisa dilakukan pada November 2006 dengan dipantau oleh misi pengawasan pemilihan luar dari Uni Eropa, Election Observation Mission (EOM) walau sempat terjadi satu dua kerusuhan kecil di beberapa daerah.
5. Mantan anggota GAM bisa turut berpartisipasi dalam politik melalui pemilihan daerah, dengan dibuktikannya Irwandi Jusuf, mantan GAM yang telah terpilih sebagai Gubernur di Aceh.
6. Rancangan Undang-undang Pemerintahan Aceh disahkan oleh DPR menjadi undang-undang lewat rapat paripurna. RUU Pemerintahan Aceh terdiri dari 40 bab dan 273 pasal. Undang-undang dibentuk bermula dari aspirasi dan harapan masyarakat Aceh agar masyarakat dan pemerintah Aceh dapat mengembangkan kehidupan dalam keistimewaan dan

kekhususan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bisa memulai pembangunan dan melupakan masa lalu.

7. Penduduk Aceh yang tadinya memiliki kartu penduduk merah putih telah memiliki kartu penduduk baru yang sesuai dengan kartu tanda penduduk nasional Indonesia.
8. Aceh telah membangun sendiri bandara udaranya dan membuka penerbangan langsung Banda Aceh – Kuala Lumpur untuk membuka akses langsung dengan negara luar.
9. Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, telah memberikan amnesti kepada narapidana dan tahanan politik yang telah terlibat dalam kegiatan GAM dimana pemulangan para tahanan tersebut dibantu oleh International Organization for Migration (IOM).
10. Tiga puluh tahun konflik telah mengikis kepercayaan dan hubungan: antara masyarakat, antara masyarakat dan negara, serta masyarakat dan GAM. Masyarakat bisa saja menolak GAM karena pelanggaran masa lalu atau karena ketakutan bahwa menerima kembali mantan pejuang GAM dengan tangan terbuka akan menempatkan mereka dalam risiko. Tetapi program reintegrasi dari masyarakat membuat hal itu dapat dihindari sehingga mantan kombatan GAM yang tadinya tinggal di hutan-hutan untuk berperang, telah berintegrasi kembali ke masyarakat. Penulis melihat hal ini berdasarkan pengalaman saat bergabung dengan AMM.
11. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dibentuk untuk menyalurkan dana bantuan rehabilitasi bagi para korban konflik.
12. Pemerintah RI telah menarik elemen tentara dari Aceh.
13. Pembentukan misi monitoring Aceh yang telah menjalankan tugas sampai dengan 15 Desember 2006 antara lain
  - a) Telah memantau demobilisasi GAM dan decomissioning persenjataannya.
  - b) Telah memantau relokasi tentara dan polisi non-organik.
  - c) Telah memantau reintegrasi anggota-anggota GAM yang aktif ke dalam masyarakat.

- d) Memantau situasi hak asasi manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini sampai dengan akhir masa tugas Desember 2006.
  - e) Telah memantau proses perubahan peraturan perundang-undangan.
  - f) Telah membentuk dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak baik pihak GAM dan pemerintah Indonesia.
14. Sosialisasi proses perdamaian dilakukan di segala lapisan masyarakat termasuk sosialisasi di sekolah-sekolah, desa-desa, melalui radio-radio lokal dan poster-poster di pinggir jalan.
  15. Sosialisasi perdamaian dalam bentuk seni pertunjukan kebudayaan masyarakat setempat diadakan di lapangan terbuka sebagai wadah untuk masyarakat serta mantan anggota GAM untuk berkumpul dan menyebarkan semangat perdamaian.
  16. Dialog untuk pemerintah dan mantan anggota GAM dilakukan secara berkala dengan difasilitasi oleh AMM sebagai wadah untuk pemerintah RI dan GAM berkoordinasi dan membahas program pengembangan ekonomi, masalah keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Dialog ini dilakukan baik ditingkat kecamatan, kabupaten, maupun provinsi, melalui pertemuan ini juga hubungan baik antara pemerintah RI di tingkat daerah dan GAM bisa semakin ditingkatkan.

Ketetapan MoU mengenai dana bantuan reintegrasi adalah ditujukan untuk bantuan kepada tiga kelompok, yaitu mantan kombatan GAM, tahanan politik yang mendapatkan amnesti dan juga masyarakat sipil yang terkena dampak dari konflik GAM. Setelah para narapidana dibebaskan pada Agustus 2005, mereka di data dan dimasukkan dalam program reintegrasi termasuk mengenai fasilitasi ekonomi, kesehatan, dan kesempatan mendapatkan pelatihan kejuruan. 3000 mantan kombatan GAM sejauh telah menerima tiga kali pemberian dana fasilitas ekonomi dari pemerintah, dengan jumlah tiga juta rupiah per mantan kombatan. Sebagian mantan kombatan dan masyarakat sipil yang telah terkena dampak konflik telah menerima program pemberdayaan ekonomi yang diadakan oleh badan pelaksana pemerintah, BRA.

BRA, atau Badan Reintegrasi Aceh didirikan pada tanggal 15 February, 2006 oleh pemerintah Aceh. Struktur BRA ada ditingkat kabupaten dan provinsi. Perwakilan BRA merupakan perwakilan dari pemerintah, GAM dan juga masyarakat sipil Aceh. BRA juga bekerja sama dengan badan donor lain dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program reintegrasi paska konflik. Pada bulan April 2005. Tugas utama dari BRA adalah mempersiapkan pengumpulan data proyek di seluruh Aceh, untuk maksud memberikan bantuan sosial langsung kepada masyarakat sipil yang bisa menunjukkan atau membuktikan kerugiannya yang diakibatkan oleh konflik. Kompensasi didistribusikan melalui bantuan komunitas BRA bagi masyarakat sipil yang terkena dampak konflik.

Mengenai reintegrasi, kembali ke masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh mantan kombatan saja. Tapi juga oleh penduduk sipil yang terkena dampak konflik. Pada saat konflik, banyak penduduk yang mengungsi ke tempat lain, akibat desa yang mengalami kerusakan, atau rumah di bakar. Tetapi setelah penandatanganan MoU, pada tanggal 15 Agustus, perlahan-lahan mereka kembali ke desa mereka masing-masing.

Tingkat kriminalitas oleh GAM juga drastis menurun setelah MoU, walaupun ada perampokan, pencurian, dan tindakan lain. Itu karena murni tindakan kriminal, dan bukan disebabkan oleh GAM. Masyarakat sudah tidak mendapatkan ancaman dan pemerasan lagi.

Setahun pertama setelah perjanjian damai, mantan kombatan masih ragu-ragu akan pemerintah Indonesia. Bahkan mereka masih menggunakan nama samaran dan belum mau menggunakan nama asli. Tetapi dengan dialog yang diadakan berkala antar pemerintah, masyarakat dan mantan GAM maka lama kelamaan anggota GAM sudah mulai terbuka.

Sebagian dari indikator keberhasilan ini dialami dan dilihat langsung oleh penulis berdasarkan pengalaman penulis pada saat penulis bekerja di Aceh Monitoring Mission (AMM) pada tahun 2006. Dalam penelitian ini semua aspek mulai dari aktor utama, dinamika dan isu-isu yang dibahas telah dikaji.

Ada pendapat yang menilai, dalam masa proses negosiasi antara GAM dan pemerintah Indonesia di Helsinki, penduduk sipil kurang dilibatkan. Pendapat masyarakat sipil tidak coba ditampung terutama untuk butir-butir yang tercantum

di dalam MoU. Tetapi bagaimanapun, kita bisa melihat, dampak dari MoU dan mediasi yang telah dilakukan, telah menjangkau semua lini masyarakat di Aceh sekarang. Sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupan dan membangun Aceh untuk masa depan masyarakat Aceh.

